



## Literature Review: Pengukuran Kinerja Sektor Publik di Era Globalisasi

Fadil Azury Farega Rambe<sup>1</sup>, Raihan Ananda Azma<sup>2</sup>, Maureen Christy A.Br. Simarmata<sup>3</sup>, Nasirwan<sup>4</sup>, Zamhir Basem<sup>5</sup>, Nisha Marina<sup>6</sup>

[fadil010522@gmail.com](mailto:fadil010522@gmail.com)<sup>1</sup>, [raihanananda57@gmail.com](mailto:raihanananda57@gmail.com)<sup>2</sup>, [maureen7simar@gmail.com](mailto:maureen7simar@gmail.com)<sup>3</sup>, [nasirwan@unimed.ac.id](mailto:nasirwan@unimed.ac.id)<sup>4</sup>, [zamhirbasem803@gmail.com](mailto:zamhirbasem803@gmail.com)<sup>5</sup>, [nisha@ecampus.ut.ac.id](mailto:nisha@ecampus.ut.ac.id)<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Negeri Medan

<sup>5</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang

<sup>6</sup> Universitas Terbuka

### Article Info

#### Article history:

Received Jun 19<sup>th</sup>, 2024

Revised Aug 26<sup>th</sup>, 2024

Accepted Aug 28<sup>th</sup>, 2024

#### Kata Kunci:

Akuntansi

Sektor Publik

Pengukuran Kinerja

### ABSTRAK

Digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam pengukuran kinerja sektor publik, meningkatkan efisiensi pengumpulan data dan transparansi pelaporan. Dengan memanfaatkan teknologi modern, instansi publik dapat menganalisis data secara real-time, yang berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, keberhasilan implementasi digitalisasi memerlukan kesiapan infrastruktur, keterampilan sumber daya manusia, dan keamanan data yang memadai. Rekomendasi untuk mengoptimalkan manfaat digitalisasi mencakup integrasi sistem, pelatihan pegawai, dan prioritas pada keamanan informasi. Kolaborasi antara pemerintah, penyedia teknologi, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai transformasi digital yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik secara keseluruhan. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengukuran kinerja yang berbasis data dalam memastikan pelayanan yang efektif dan efisien di era digital.

### ABSTRACT

Digitalization has brought significant changes in public sector performance measurement, increasing the efficiency of data collection and transparency of reporting. By leveraging modern technology, public agencies can analyze data in real-time, contributing to increased accountability and citizen participation. However, successful implementation of digitalization requires adequate infrastructure, human resource skills, and data security. Recommendations to optimize the benefits of digitalization include system integration, employee training, and prioritizing information security. Collaboration between government, technology providers, and citizens is essential to achieve digital transformation that is expected to improve overall public services. This study highlights the importance of data-driven performance measurement in ensuring effective and efficient service delivery in the digital era.



© 2024 Para Penulis. Diterbitkan oleh Perkumpulan Konsultan Manajemen Pendidikan Indonesia (PKMPI). Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY-NC-SA (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

### Corresponding Author:

Nama Penulis, Fadil Azury Farega Rambe

Affiliation Universitas Negeri Medan

Email: [fadil010522@gmail.com](mailto:fadil010522@gmail.com)

---

## Latar Belakang

Dalam menghadapi era globalisasi yang penuh dengan tantangan dan peluang, penting bagi setiap negara untuk memikirkan kembali arah pembangunan nasional agar lebih maju, merata, dan berkelanjutan. Pembangunan yang efektif tidak hanya bergantung pada sumber daya alam atau teknologi, tetapi juga pada pengelolaan anggaran yang tepat dan efisien. Penyerapan anggaran merujuk pada sejauh mana anggaran yang dialokasikan dapat digunakan atau terealisasi. Secara umum, semakin besar jumlah anggaran yang terserap, semakin dianggap baik. Namun, hal yang perlu menjadi perhatian utama adalah apakah penggunaan anggaran tersebut benar-benar memberikan manfaat yang sesuai dengan tujuan dan visi yang telah ditetapkan, atau apakah anggaran tersebut hanya digunakan untuk kepentingan pribadi atau hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan pembangunan nasional (Tambariki et al., 2018). Dengan demikian, penyerapan anggaran seharusnya tidak hanya diukur berdasarkan besaran anggaran yang terserap, tetapi juga efektivitas penggunaannya dalam mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi kinerja terhadap organisasi-organisasi sektor publik untuk dapat memantau sejauh mana penggunaan anggaran tersebut efektif dan bagaimana serapan anggaran dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Sistem pengukuran kinerja dapat didefinisikan sebagai suatu proses terstruktur yang dirancang untuk menilai sejauh mana suatu organisasi atau entitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Tambariki et al., 2018). Proses ini melibatkan pencocokan antara target yang telah direncanakan sebelumnya dengan hasil yang tercapai, serta memberikan penghargaan atau insentif berdasarkan capaian tersebut sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan (Fazri et al., 2022). Pengukuran kinerja dalam suatu organisasi dapat dilakukan dengan mengandalkan dua jenis informasi, yakni informasi finansial dan nonfinansial (Putri, 2020). Penilaian kinerja finansial umumnya dilakukan berdasarkan pada anggaran yang telah disusun sebelumnya. Dalam hal ini, penilaian dilakukan melalui proses analisis varians, yaitu membandingkan hasil aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan (Wuwungan et al., 2019). Analisis varians berfokus pada perbedaan yang terjadi antara pendapatan yang diharapkan dan yang diterima (varians pendapatan), serta antara belanja yang direncanakan dan belanja yang sebenarnya dilakukan (varians pengeluaran), yang mencakup belanja rutin dan belanja untuk investasi atau modal (Kojo et al., 2019). Kinerja sektor publik memiliki karakteristik yang bersifat multidimensional, yang berarti bahwa tidak ada satu indikator tunggal yang dapat menggambarkan kinerja secara menyeluruh dan komprehensif. Hal ini berbeda dengan sektor swasta, di mana output yang dihasilkan lebih mudah diukur dengan indikator yang jelas, seperti laba atau volume produk yang diproduksi. Di sektor publik, sebagian besar hasil yang dicapai cenderung bersifat *intangibile* atau tidak terukur secara langsung, seperti peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, keadilan sosial, dan efektivitas pelayanan publik (Tama, 2017). Oleh karena itu, ukuran finansial saja tidak cukup untuk menilai kinerja sektor publik secara menyeluruh.

Di era transformasi digital saat ini, pengukuran kinerja sektor publik menjadi semakin relevan untuk memastikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tetap efektif dan efisien. Sektor publik memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, mencakup berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan (Hilmi et al., 2018). Pengukuran kinerja di sektor publik menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks, sehingga sering kali pelaksanaannya menjadi sulit dilakukan secara optimal. Meskipun demikian, penilaian kinerja merupakan fungsi yang sangat penting dalam mendorong organisasi untuk mencapai tujuannya dengan cara yang efektif dan efisien.

Tanpa adanya sistem penilaian yang terstruktur dengan baik, sangat berisiko bagi organisasi untuk menjalankan operasional sehari-hari tanpa mengetahui secara akurat bagaimana kinerja individu dalam organisasi tersebut. Kinerja individu memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keseluruhan organisasi. Tanpa adanya penilaian kinerja yang tepat, organisasi berpotensi mengalami stagnasi, karena tidak dapat secara efektif mengidentifikasi apakah individu atau tim telah memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian tujuan bersama. Pengukuran kinerja berfungsi sebagai mekanisme untuk memantau secara berkelanjutan prestasi individu,

---

mengidentifikasi kelemahan dalam pelaksanaan tugas, serta memberikan kesempatan untuk perbaikan (Riska et al., 2024). Selain itu, pengukuran kinerja juga memberikan landasan untuk pemberian penghargaan atau insentif berdasarkan prestasi yang dicapai oleh individu, yang sangat penting untuk menjaga motivasi dan kinerja yang tinggi.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah secara jelas. Penelitian ini berfokus pada upaya untuk memberikan penjelasan yang rinci dan terstruktur tentang suatu kelompok, kondisi, atau peristiwa tertentu (Adlini et al., 2022). Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam implementasi digitalisasi dalam pengukuran kinerja sektor publik di berbagai instansi pemerintah. Penelitian dilakukan di beberapa instansi publik yang telah menerapkan sistem digital dalam pengukuran kinerja, baik di tingkat pemerintah daerah maupun pusat. Subjek penelitian meliputi pegawai instansi publik, pengambil keputusan, dan masyarakat yang berinteraksi dengan layanan publik. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pegawai dan pengambil keputusan untuk menggali pengalaman dan pandangan mereka mengenai digitalisasi dalam pengukuran kinerja, observasi atas proses pengumpulan dan analisis data kinerja yang dilakukan secara digital di instansi yang diteliti serta dokumentasi atas dokumen terkait kebijakan, laporan kinerja, dan data statistik yang relevan untuk mendukung analisis. Teknik analisis data yang digunakan adalah Koding data untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul serta mengelompokkan tema berdasarkan kategori yang relevan dengan tujuan penelitian pengukuran kinerja sektor publik dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

## Hasil dan Pembahasan

Dengan penerapan teknologi digital, instansi publik mampu mengumpulkan dan menganalisis data dengan lebih cepat dan akurat. Proses yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan secara otomatis, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan. Data yang dikumpulkan secara digital dapat diakses oleh masyarakat dengan lebih mudah, meningkatkan transparansi dalam pelaporan kinerja. Hal ini juga berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas instansi publik, karena masyarakat dapat memantau kinerja pemerintah secara langsung. Pengukuran kinerja kini lebih berorientasi pada efisiensi, inovasi, dan kepuasan publik. Indikator kinerja utama yang berbasis data memungkinkan instansi publik untuk mengevaluasi kinerja mereka dengan lebih objektif. Digitalisasi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan kinerja sektor publik. Dengan adanya platform digital, masyarakat dapat memberikan masukan dan melaporkan masalah yang mereka temui, sehingga menciptakan hubungan yang lebih interaktif antara pemerintah dan masyarakat. Digitalisasi telah membawa perubahan yang mendasar dalam pengukuran kinerja sektor publik (Wardani, 2018).

Dalam era digitalisasi yang semakin berkembang, pengukuran kinerja menjadi lebih kompleks dan memerlukan metode yang dapat mencakup berbagai dimensi secara lebih efektif dan efisien. Sistem pengukuran kinerja, seperti *Balanced Scorecard* dan *Value For Money*, semakin relevan karena digitalisasi memberikan akses lebih besar terhadap data yang dapat digunakan untuk menilai kinerja secara lebih akurat dan real-time. Misalnya, melalui *Balanced Scorecard*, teknologi digital memungkinkan pengumpulan dan analisis data keuangan, kepuasan konsumen, efisiensi proses internal, serta perkembangan kapasitas organisasi dengan lebih cepat dan tepat. Begitu pula, dalam konteks *Value For Money*, digitalisasi memungkinkan instansi pemerintah untuk memantau penggunaan sumber daya, mengukur efektivitas program, dan melakukan evaluasi terhadap hasil dengan lebih transparan dan terukur (Regisof Mega Wahiji et al., 2022).

Laporan keuangan juga merupakan salah satu komponen penting dalam menciptakan akuntabilitas sektor yang memberikan gambaran mengenai kondisi finansial suatu entitas pemerintah, tetapi juga sebagai alat ukur kinerja finansial yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan publik (Arifin, 2020). Dalam era digitalisasi, pengukuran kinerja

---

sektor publik menjadi semakin relevan dan kompleks. Digitalisasi memberikan peluang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyajian laporan keuangan. Dengan menggunakan teknologi informasi, proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keuangan dapat dilakukan lebih cepat, akurat, dan dapat diakses dengan mudah oleh publik. Laporan keuangan masih lebih dominan digunakan dibandingkan laporan kinerja, di mana laporan keuangan tahunan menduduki posisi teratas sebagai alat profesional untuk menyampaikan akuntabilitas pemerintah daerah kepada para pemangku kepentingan (Akbar, 2018). Di sisi lain, dalam konteks komunikasi politis, program radio, rapat antara eksekutif dan legislatif menjadi saluran yang paling banyak digunakan, sementara Kamar Dagang dan Industri (KADIN) mendapatkan perhatian yang sangat terbatas. Kondisi ini mungkin menjelaskan mengapa dunia usaha sering menyuarakan ketidakpuasannya terhadap pemerintah daerah, yang mereka nilai kurang memberikan perhatian atau dukungan yang cukup terhadap sektor bisnis.

Dengan kemajuan teknologi dan akses data yang lebih mudah, pengukuran kinerja sektor publik dan swasta kini dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan berbasis bukti, yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan hasil yang lebih optimal. Dalam konteks ini, digitalisasi tidak hanya mempercepat proses pengukuran, tetapi juga meningkatkan akurasi dan relevansi hasil yang diperoleh, yang pada gilirannya membantu meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Digitalisasi memberikan banyak manfaat, termasuk pengurangan kesalahan manual dan peningkatan transparansi. Dengan sistem yang terintegrasi, instansi publik dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, serta meningkatkan akurasi informasi yang disajikan. Hal ini sangat penting dalam pengambilan keputusan yang berbasis bukti, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Meskipun digitalisasi menawarkan banyak keuntungan, tantangan tetap ada. Kesiapan infrastruktur teknologi menjadi salah satu kendala utama, terutama di daerah terpencil yang masih memiliki keterbatasan akses internet. Selain itu, keterampilan sumber daya manusia juga menjadi tantangan, di mana tidak semua pegawai memiliki kemampuan yang memadai untuk mengoperasikan teknologi digital. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan keterampilan menjadi sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi sistem digital. Aspek keamanan data juga menjadi perhatian utama dalam era digitalisasi (Ummah, 2019). Dengan meningkatnya penggunaan teknologi, risiko kebocoran atau penyalahgunaan data juga meningkat. Instansi publik harus memastikan adanya sistem keamanan siber yang kuat untuk melindungi data sensitif. Kebijakan keamanan data yang komprehensif perlu dikembangkan dan diterapkan untuk menjaga integritas informasi yang dikelola.

Untuk mengoptimalkan manfaat digitalisasi dalam pengukuran kinerja sektor publik, beberapa langkah strategis perlu diambil. Pertama, integrasi sistem yang lebih baik antara berbagai platform digital harus dilakukan untuk menciptakan alur informasi yang lebih efisien. Kedua, penyediaan pelatihan yang memadai bagi pegawai sangat penting untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan teknologi digital. Ketiga, prioritas pada keamanan informasi harus menjadi fokus utama, dengan pengembangan kebijakan yang melibatkan semua pihak dalam menjaga integritas data. Kolaborasi antara pemerintah, penyedia teknologi, dan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan transformasi digital ini. Dengan melibatkan semua pihak, instansi publik dapat menciptakan sistem yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan kinerja sektor publik juga dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

## Kesimpulan

Digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam pengukuran kinerja sektor publik, meningkatkan efisiensi pengumpulan data dan transparansi pelaporan. Dengan memanfaatkan teknologi modern, instansi publik dapat melakukan analisis data secara real-time, yang berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Namun, keberhasilan implementasi digitalisasi sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, keterampilan sumber daya manusia, dan keamanan data yang memadai.

Rekomendasi untuk mengoptimalkan manfaat digitalisasi mencakup integrasi sistem, pelatihan pegawai, dan prioritas pada keamanan informasi. Selain itu, penggunaan teknologi seperti dashboard interaktif dan big data analytics dapat membantu dalam pemantauan kinerja yang lebih transparan dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Kolaborasi antara pemerintah, penyedia teknologi, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mencapai transformasi digital yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik secara keseluruhan.

## Daftar Pustaka

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Akbar, R. (2018). Pengukuran Kinerja dan Akuntabilitas Publik di Indonesia Studi Awal di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Akuntabilitas Publik*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jaap.35332>
- Arifin, S. (2007). Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Membangun Ekonomi Untuk Menghadapi Era Globalisasi. *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 155–174.
- Belinda, P. A., Costari, N. (2021). Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Satu Instansi Pemerintahan. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1(1), 58-77
- Fazri, E., Josiah, T., Pratiwi, E. U., Ainasya, A. R., & Andesti, D. (2022). Determinant Faktor Keberhasilan Penerapan Sistem Pengukuran Kinerja Sektor Publik. *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis*, 7(2), 123–138. <https://doi.org/10.24967/ekombis.v7i2.1805>
- Hilmi, R. Z., Hurriyati, R., & Lisnawati. (2018). *Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan Dengan Menggunakan Value For Money*. 3(2), 91–102.
- Karyoto. (2017). Implementasi Value for Money, Input Output Outcome dan Best Value Sebagai Alat Pengukuran Kinerja Sektor Publik. *Jurnal Jibeka*, 11(1), 72-82
- Kojo, O., Tinangon, J. J., & Afandi, D. (2019). Analisis Penilaian Kinerja Sektor Publik (Studi Kasus Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset ...*, 7(53), 4281–4290. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/25063%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/25063/24763>
- Nainggolan, I. R. G., Lubis, P. K. D & Simanjuntak, Y. (2024) Peran Pengukuran Kinerja Sektor Publik Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(4), 758-765
- Pratama, M. R. (2021) Tantangan Membangun Manajemen Dan Pengukuran Kinerja Sektor Publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara*, 25(1), 1-13
- Putri, F. O. (2020). Pengaruh Insentif Dan Ukuran Kinerja Non Finansial Terhadap Kinerja Manajerial Perguruan Tinggi. Putri, F. O. (2020). Pengaruh Insentif Dan Ukuran Kinerja Non Finansial Terhadap Kinerja Manajerial Perguruan Tinggi. *Business and Economics Conference in Utili. Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 104–120.
- Regisof Mega Wahiji, T., Karamoy, H., Kapojos, P. M., Akuntansi, J., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2022). Analisis Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Menggunakan Pendekatan Value For Money Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(1), 335–344.
- Rino, F. Batubara, H. & Sujana, I. (2023). Pengukuran Kinerja Sektor Publik Menggunakan Metode Balance Scorecard (BSC) Dengan Pembobotan Analytical Hierarchy Proses (AHP) Pada Kantor Desa Pengadang. *Jurnal Teknik Industri*, 7(3), 75-82
- Riska, I., Nainggolan, G., Kemala, P., Lubis, D., Benediktus, R., & Simanjuntak, Y. (2024). *Mewujudkan Good Governance The Role Of Public Sector Performance Measurement In Realizing Good Governance*. 758–765.
- Sarsiti. (2020). Akuntansi Sektor Publik. Jawa Barat. Green Publisher Indonesia
- Tama, A. I. (2017). Perspektif Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 8(2), 221–235. <https://doi.org/10.33558/jrak.v8i2.940>
- Tambariki, B. T., Karamoy, H., & Tangkuman, S. J. (2018). Penggunaan Informasi Finansial Dalam Mengukur Kinerja Organisasi Sektor Publik (Studi Pada Puskesmas Bahu). *Going Concern :*

- 
- Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 550–556. <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20673.2018>
- Ummah, M. S. (2019). Akuntansi Sektor Publik. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_Sistem\\_Pembetulan\\_Terpusat\\_Strategi\\_Melestari](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari)
- WARDANI, A. K. (2018). Dormansi Organisasi Di Era Globalisasi. *Journal Moderat*, 4(1), Hlm 28-35.
- Wuwungan, G. T., Tinangon, J., & Rondonuwu, S. (2019). Penerapan Metode Value for Money Sebagai Tolok Ukur Penilaian Kinerja Keuangan Pada Organisasi Sektor Publik Di Dinas Kesehatan Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4), 354–361. <https://doi.org/10.32400/gc.14.4.26288.2019>